

POINTER RAPAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

PADA DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROV LAMPUNG

SENIN, 24 MEI 2021

I. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

VISI : "RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat,

pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

5. Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun

MISI Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Tahun 2019-2024 adalah:

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Misi 2 : Mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Misi 3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.

Misi 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Telaahan terhadap visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung maka **Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung diarahkan dan difokuskan untuk mendukung MISI KEDUA yaitu “MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK”.**

TUJUAN : “MENINGKATNYA KUALITAS REFORMASI BIROKRASI”

Rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sesuai dengan program adalah :**“MENINGKATNYA KUALITAS REFORMASI BIROKRASI”**Yang dilaksanakan dengan cara mewujudkan tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas.

SASARAN : “MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”

Yaitu : Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditopang oleh aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi :

1. Peningkatan persentase cakupan perekaman;
2. Peningkatan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18;
3. Peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan penerbitan KIA dari 4 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 menjadi 15 Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan data kematian.
5. Mewujudkan ketersediaan aplikasi pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di Lampung pada tahun 2024;
6. Mewujudkan kesadaran masyarakat yang sadar untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Terwujudnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan stakeholder dengan menggunakan KTP-El;
8. Mewujudkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota yang optimal
9. Bertambahnya jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, dan yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama(PKS) sesuai Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, yaitu 11 OPD pada tahun 2020 diharapkan menjadi seluruh OPD pada tahun 2024.
10. Memperluas akses masyarakat terkait data kependudukan dalam pembangunan desa dan penataan kota pada seluruh sektor seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Demi Mewujudkan Provinsi Lampung Menjadi Provinsi Lampung Berjaya sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di atas, dan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahaan lainnya, maka isu strategis yang ada pada bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah :

1. Melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dari segi pendidikan dan keahlian berupa peningkatan pengetahuan/bimbingan tekhnis, kursus-kursus, penyegaran/rotasi serta penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/wilayah.
2. Melakukan upaya pengajuan penambahan sarana dan prasarana kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di Kab/Kota.
3. Melakukan upaya-upaya peningkatan pola komunikasi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dengan Kab/Kota se- Provinsi Lampung dengan cara mengadakan rapat-rapat/pertemuan secara rutin dalam rangka pembahasan peningkatan pelayanan Adminduk.
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana belum seluruhnya di terapkan oleh Kab/Kota (khususnya BKD).
 - c. Menganggarkan aplikasi laporan harian pelayanan adminduk secara Daring (Dalam Jaringan) untuk laporan harian pelayanan adminduk yang masih bersifat manual. (saat ini telah dilaksanakan)
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan antara lain :

- a. Sosialisasi ke masyarakat dalam rangka pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta memfasilitasi dan melakukan pola pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kab/Kota dengan sarana yang mudah dijangkau, cepat, transparan dan jempuk bola dengan mendatangi masyarakat langsung.
 - b. Pelaksanaan program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA) yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi merupakan salah satu inovasi daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pemanfaatan data kependudukan dengan seluruh OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

<p style="text-align: center;">Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA</p>			
<p style="text-align: center;">MISI 2 : MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIC</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkat-nya kualitas reformasi birokrasi.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kualitas pengelolaan dan layanan penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana SIAK yang terintegrasi di Provinsi dan Kab/Kota. 3. Penyelenggaraan sosialisasi, pendampingan terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan penyelenggaraan layanan publik berbasis NIK bagi masyarakat dan dunia usaha. 4. Peningkatan akses masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan yang terintegrasi dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. 2. Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 3. Melakukan penyuluhan/sosialisasi akan perlunya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota, instansi lintas 6ector6l dan stake holder lainnya.

		<p>GISA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan koordinasi dengan pusat, Kabupaten/Kota, Instansi Lintas Sektoral dan Stake Holder lainnya. 6. Penyediaan data kependudukan secara akurat dan terpadu. 7. Pengembangan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung. 8. Meningkatkan fasilitasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menyediakan data kependudukan secara terintegrasi dengan pusat dan kabupaten/kota. 6. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung. 7. Melakukan sosialisasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil. 8. Meningkatkan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan.
--	--	---	--

KETERKAITAN DENGAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mendukung prioritas kesatu nasional yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, adapun visi Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2019-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatnya pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi tersebut diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik, dimana Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam mencapai Visi di atas, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi pusat dan daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public.

II. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan rincian :

URAIAN	PAGU MURNI	PAGU REFOCUSING	PAGU APBD PERUBAHAN	REALISASI per 31 DES 2020	
				KEUANGAN	%
2	3	4	5	6	7
BELANJA LANGSUNG	3.660.269.000	2.127.786.050	2.127.786.050	1.871.167.544	88%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.133.926.843	6.133.926.843	4.823.329.599	4.400.316.199	91%
TOTAL BL + BTL	9.794.195.843	8.261.712.893	6.951.115.649	6.271.483.743	90%

(Uraian lengkap terlampir)

III. HAMBATAN

Pada periode Tahun 2020 tengah terjadi Pandemic Covid-19 yang melanda lingkungan domestik, nasional dan global yang berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Disdukcapil Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan kegiatan, antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) ; namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.
2. Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan *schedule* dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap *wait and see* dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika dan kebijakan yang

berkembang ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.

3. Memperhatikan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran (rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pandemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (mengurangi) jumlah *output*, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.

UPAYA-UPAYA

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Lampung untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya, antara lain:

- Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas baik kedalam daerah (kabupaten/kota) atau ke luar daerah (Pusat)
- Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/rapat-rapat yang melibatkan Kabupaten/Kota atau Pemerintah Pusat dilaksanakan secara virtual meeting.
- Merancang skala prioritas dan re-schedule pelaksanaan kegiatan.
- Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pengelola kegiatan senantiasa memperkuat koordinasi dan kemampuan manajerial serta kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif.

IV. CAPAIAN KINERJA

Ditegah isu Pandemic Covid-19 yang tengah terjadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan diperoleh nilai sebesar **96,76 %**, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			KEUANGAN	KINERJA
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.018.962.600		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.758.000	76%	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	269.993.000	98%	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.500.000	100%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.587.500	99%	100%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.329.700	96%	85%
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	17.424.400	100%	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	37.145.000	99%	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	17.750.000	84%	81%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	263.875.000	90%	100%
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	73.600.000	100%	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261.325.900		
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.250.000	100%	100%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	180.975.900	90%	100%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	43.100.000	100%	100%
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	55.138.500		
14	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	46.150.000	9%	65%
15	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	8.988.500	68%	100%
IV	Prog. Perencanaan, Evaluasi & Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	195.175.750		
16	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	22.288.600	90%	100%
17	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	22.912.000	87%	100%

18	Penyusunan Dokumen Perencanaan	46.975.150	99%	100%
19	Pengemb. E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	103.000.000	100%	100%
1	2	3	4	5
V	Prog. Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	457.435.300		
20	Penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan Data kPDK bagi OPD Provinsi	32.311.500	60%	75%
21	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	54.032.800	99%	100%
22	Monev Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000	64%	100%
23	Pengembangan dan Perhimpunan Administrasi Kependudukan (DAK)	321.091.000	87%	100%
VI	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	57.558.100		
24	Pemb.dan Fasilitasi Penyelengg. Administrasi Pendaftaran Penduduk	13.831.700	87%	100%
25	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	17.406.400	79%	100%
26	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Berbasis IT Kab/ Kota se Provinsi Lampung	26.320.000	97%	100%
VII	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	82.189.900		
27	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil	24.594.000	52%	100%
28	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	17.263.800	81%	100%
29	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Berbasis IT Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung	40.332.100	89%	100%
JUMLAH		2.127.786.050	88%	96,76%

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG,

ACHMAD SAEFULLOH, S.H.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19691209 201501 1001

PROGRAM / KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TA. 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU REFOCUSING	PAGU APBD PERUBAHAN	REALISASI per 31 DES 2020	
					KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.573.230.200	1.091.294.650	1.018.962.600	930.585.493	91%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.800.000	265.800.000	203.758.000	154.117.499	76%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	271.406.000	269.993.000	269.993.000	265.158.000	98%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.000.000	16.500.000	19.500.000	19.487.200	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	12.587.500	12.587.500	12.417.400	99%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.811.200	76.257.650	103.329.700	99.115.375	96%
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	17.862.000	8.931.000	17.424.400	17.383.600	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	36.000.000	37.145.000	36.724.400	99%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	70.000.000	17.750.000	17.750.000	14.927.000	84%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	627.751.000	313.875.500	263.875.000	237.659.019	90%
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	73.600.000	73.600.000	73.600.000	73.596.000	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	405.055.800	209.527.900	261.325.900	243.240.500	93%
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	74.500.000	37.250.000	37.250.000	37.150.000	100%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	223.855.800	118.927.900	180.975.900	163.090.500	90%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	106.700.000	53.350.000	43.100.000	43.000.000	100%
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	125.652.000	65.163.500	55.138.500	10.302.000	19%
14	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	107.675.000	56.175.000	46.150.000	4.230.000	9%
15	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	17.977.000	8.988.500	8.988.500	6.072.000	68%
IV	Prog. Perencanaan, Evaluasi & Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	780.596.600	167.380.800	195.175.750	188.854.700	97%
16	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	19.973.600	14.030.800	22.288.600	20.102.500	90%

17	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	22.912.000	16.118.000	22.912.000	19.908.100	87%
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan	40.351.000	34.232.000	46.975.150	46.337.100	99%
19	Pengemb. E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	697.360.000	103.000.000	103.000.000	102.507.000	100%
V	Prog. Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	539.686.400	454.671.200	457.435.300	384.162.251	84%
20	Penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan Data kPDK bagi OPD Provinsi	52.523.000	32.311.500	32.311.500	19.471.400	60%
21	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	66.072.400	51.268.700	54.032.800	53.539.000	99%
22	Monev Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100.000.000	50.000.000	50.000.000	32.012.400	64%
23	Pengembangan dan Perhimpunan Administrasi Kependudukan (DAK)	321.091.000	321.091.000	321.091.000	279.139.451	87%
VI	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	97.677.000	57.558.100	57.558.100	51.370.400	89%
24	Pemb.dan Fasilitasi Penyelengg. Administrasi Pendaftaran Penduduk	18.934.000	13.831.700	13.831.700	12.018.750	87%
25	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	26.103.000	17.406.400	17.406.400	13.782.650	79%
26	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Berbasis IT Kab/ Kota se Provinsi Lampung	52.640.000	26.320.000	26.320.000	25.569.000	97%
VII	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	138.371.000	82.189.900	82.189.900	62.652.200	76%
27	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil	32.728.000	24.594.000	24.594.000	12.761.000	52%
28	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	25.643.000	17.263.800	17.263.800	13.922.000	81%
29	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Berbasis IT Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung	80.000.000	40.332.100	40.332.100	35.969.200	89%
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		3.660.269.000	2.127.786.050	2.127.786.050	1.871.167.544	88%
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)		6.133.926.843	6.133.926.843	4.823.329.599	4.400.316.199	91%
TOTAL BL + BTL		9.794.195.843	8.261.712.893	6.951.115.649	6.271.483.743	90%

KETERANGAN :

I.	BELANJA LANGSUNG	PAGU	
	PAGU MURNI	3.660.269.000	
	PAGU RECUSSING (berkurang RP. 1.532.482.950)	2.127.786.050	BERKURANG
	PAGU APBD P	2.127.786.050	TETAP

	Realisasi	1.871.167.544	88%
	Sisa	256.618.506	12%
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)	PAGU	
	PAGU MURNI	6.133.926.843	
	PAGU RECUSSING	6.133.926.843	TETAP
	PAGU APBD P (berkurang Rp. 1.310.597.244)	4.823.329.599	BERKURANG
	Realisasi	4.400.316.199	91%
	Sisa	423.013.400	9%